



Analisa Pembentukan *Masterplan* Alutsista di Indonesia Guna Memperkuat Sistem Pertahanan Nasional

Agung Purnomo¹, Hardiman², Rina Marlina³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: goenx1723@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: <i>Master Plan;</i> <i>Defense System;</i> <i>MEF.</i>	President Joko Widodo wants a big plan related to the formation of a master plan in carrying out a long-term defense equipment procurement activity for the next 25 years. Later the master plan will replace the Minimum Essential Force (MEF). The President has ordered the Minister of Defense to draw up a master plan with the TNI leadership, later this master plan will make Indonesia a country that has total and comprehensive defense capabilities. This is because since 2007 the government has been trying to modernize the main defense system through the MEF system, but its implementation is expected to slow down. So the importance of this journal article will discuss related to the analysis of the formation of the main defense equipment master plan in Indonesia to strengthen the national defense system. In writing journal articles, the authors use qualitative methods taken from literature studies and processed descriptively to produce an analysis related to existing facts. The result of the method applied in analyzing the making of this journal is that from the delay due to the lack of budget for the Minimum Essential Force (MEF) system which was mapped effectively from 2007 it turned out that the master plan became a master plan as a solution to deal with it. So that the formation of a master plan for the procurement of defense equipment is very-very prioritized. Given the state of Indonesia is in a strategic position.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: <i>Masterplan;</i> <i>Alutsista;</i> <i>MEF.</i>	Presiden Joko Widodo menginginkan rencana besar terkait dengan pembentukan <i>masterplan</i> dalam melakukan suatu kegiatan pengadaan alutsista jangka panjang hingga 25 tahun kedepan. Nantinya <i>masterplan</i> tersebut akan menggantikan <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) atau Kekuatan Esensial Minimum. Presiden telah memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menyusun <i>masterplan</i> bersama pimpinan TNI, nantinya <i>masterplan</i> tersebut akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai kemampuan pertahanan secara total dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2007 pemerintah berupaya memodernisasi alutsista melalui sistem MEF, namun implementasinya diperkirakan akan melambat. Sehingga pentingnya artikel jurnal ini akan membahas terkait dengan analisa pembentukan <i>masterplan</i> alutsista di Indonesia guna memperkuat sistem pertahanan nasional. Dalam menulis artikel jurnal, penulis menggunakan metode kualitatif yang diambil dari kajian literature dan diolah secara deskriptif sehingga menghasilkan suatu analisa terkait dengan fakta yang ada. Hasil dari metode yang diterapkan dalam menganalisa pembuatan jurnal ini adalah bahwa dari adanya keterlambatan akibat minmnya anggaran terhadap sistem <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) yang dipetakan secara efektif dari tahun 2007 ternyata <i>masterplan</i> menjadi rencana induk sebagai solusi dalam menghadapinya. Sehingga dengan demikian adanya pembentukan <i>masterplan</i> terhadap pengadaan alutsista sangat-sangat diprioritaskan. Mengingat keadaan Indonesia berada di posisi yang strategis.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan asumsi publik secara geopolitik Indonesia berada pada posisi yang strategis, tentunya hal ini apa bila anggaran negara terbatas terkait dengan pengadaan atau pemeliharaan terhadap alutsista, maka hal itu akan merentankan kekuatan keamanan dan juga pertahanan negara yang sebenarnya, mengingat alutsista merupakan alat

senjata yang mejadi salah satu ujung tombak bagi pertahanan negara. Tragedi yang terjadi pada KRI Nanggala-402 menjadi pelajaran berharga yang merenggut nyawa 53 prajurit. Padahal fungsi dari adanya sebuah negara adalah untuk melindungi semua bangsa dan membuat semua warga negara merasa aman, sehingga keselamatan dan keamanan tidak boleh diabaikan.

Presiden Joko Widodo menginginkan rencana besar terkait dengan pembentukan *masterplan* dalam melakukan suatu kegiatan pengadaan alutsista jangka panjang hingga 25 tahun kedepan. Nantinya *masterplan* tersebut akan menggantikan *Minimum Essential Force* (MEF) atau Kekuatan Esensial Minimum. Presiden telah memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menyusun *masterplan* bersama pimpinan TNI, nantinya *masterplan* tersebut akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai kemampuan pertahanan secara total dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2007 pemerintah berupaya memodernisasi alutsista melalui sistem MEF, namun implementasinya diperkirakan akan melambat, adanya keterlambatan tersebut nantinya akan dapat mempengaruhi sistem pertahanan nasional.

Adapun MEF sendiri dapat dibagi menjadi beberapa fase dengan interval waktu lima tahun. Fase I berlangsung dari tahun 2010 hingga tahun 2014, Fase II dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dan Fase III yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan ditargetkan mencapai 100 persen. Pada tahun 2021 Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp136,99 triliun, adanya kenaikan 14,12 persen dari batas tahun lalu, sementara itu, alokasi untuk modernisasi alutsista serta sarana dan prasarana pertahanan hanya sebesar Rp 100 juta. untuk sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti operasi, pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentunya keterbatasan tersebut tidak menyediakan sumber dana yang cukup untuk memenuhi harapan masyarakat agar TNI dapat segera mengerahkan teknologi mutakhir dan alutsista yang mumpuni, namun keterbatasan tersebut bahkan dapat mempengaruhi upaya pemeliharaan dan kesiapan tempur.

Dari keterbatasan tersebut pemerintah juga dituntut untuk dapat melakukan pembangunan kesejahteraan dengan tetap mempertahankan kemampuan pertahanan untuk memerangi gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun lebih juga menyebabkan perubahan dan realokasi anggaran, termasuk anggaran di sektor pertahanan. Dengan demikian pentingnya penulis menulis jurnal terkait dengan analisa pembentukan *masterplan* alutsista di Indonesia guna memperkuat sistem pertahanan nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode observasi saintifik untuk mengumpulkan data *non-numerical*. Metode penelitian kualitatif yang diambil dari kajian literature dan diolah secara deskriptif sehingga menghasilkan suatu analisa terkait dengan fakta yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pertahanan Nasional

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar maupun dalam negeri, dalam bentuk dan wujud apapun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara. Menurut Jerry Indrawa (2015) dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Agus Widjojo (2021) mengatakan bahwa pendekatan konsep dalam menyusun suatu pertahanan negara tidak mungkin terlepas dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, konflik masa depan, ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, serta kepentingan nasional.

B. Keadaan Alutsista Indonesia Saat Ini

1. Minimnya Anggaran dalam Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista

Kementerian Pertahanan RI menjadi salah satu kementerian yang telah mengantongi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar, akan tetapi sebagian besar digunakan untuk biaya personel dari pada dipergunakan untuk modernisasi alat militer, oleh karena itu margin keuangan yang kecil membuat TNI tidak bisa mengerahkan alutsista terbaiknya. Sebagian besar anggaran Pertahanan didedikasikan untuk program dukungan kepemimpinan, adapun anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan alutsista

dan sarana prasarana pertahanan jumlahnya tidak seberapa. Sisanya digunakan untuk keperluan lain berupa operasional, pendidikan dan pelatihan. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan modernisasi alutsista mempengaruhi proses pemeliharaan alutsista (pemeliharaan rutin dan berkala) dan kesiapan tempur TNI dalam mengukuhkan kedaulatan negara.

Ditahun 2023 ini kementrian pertahanan dan TNI meminta untuk ditambah pagu anggarannya. Adanya penambahan tersebut dipergunakan untuk program prioritas, yang direncanakan untuk sejumlah pos di Kemhan dan TNI. Dengan adanya penambahan yang diminta oleh kemhan ditahun 2023 ini semoga akan mendorong beberapa modernisasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan alutsista, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah personil TNI terbanyak dan dengan wilayah terluas di asia.

2. Perlunya Kebijakan dan Regulasi Tertulis terkait dengan Modernisasi Alutsista

Perlunya pemerintah mendorong dalam melaksanakan percepatan untuk menerbitkan suatu regulasi atau kebijakan berupa peraturan presiden maupun undang-undang terkait juga dengan kebijakan modernisasi alutsista yang dimiliki oleh TNI. Belakangan ini terdapat suatu gagasan dari pemerintah saat sedang menyiapkan keputusan presiden tentang rencana induk modernisasi alutsista selama 25 tahun ke depan. Rencana induk itu sendiri merupakan implementasi Menteri Pertahanan Prabowo atas nama Presiden Jokowi. Setelah diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019, menhan menyerukan rencana akuisisi alutsista selama 25 tahun. Meski masih sebatas rancangan, namun hal tersebut cukup untuk menghidupkan kembali sistem pertahanan negara yang hingga saat ini sulit untuk dimajukan karena keterbatasan anggaran. Mengingat dalam melaksanakan modernisasi alutsista selain memerlukan anggaran juga memerlukan suatu keputusan yang pasti dalam mengatur dan mendesain bagaimana alutsista dipergunakan nantinya.

3. Indonesia Seharusnya Bukan Sekadar Beli alutsista

Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan peralatan militer tetapi juga pada pemenuhan dalam memelihara dan juga merawat untuk memodernisasi beberapa alutsista yang sudah dimilikinya. Menurut the Habibie Center, dalam melakukan modernisasi alutsista urgen dilakukan karena ada beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal terkait dengan urgensi melakukan modernisasi alutsista adalah kondisi alutsista yang dimiliki oleh negara Indonesia dari segi kuantitas dan kualitas keadaannya sangat memperhatikan jauh dari yang ditargetkan, selain itu umur alutsista yang dimiliki oleh negara ini rata-rata sudah mencapai 25 tahun sehingga dalam operasionalnya sering tidak optimal tentunya hal ini akan menurunkan kesiapan daya tempur TNI dan dapat meningkatkan resiko kecelakaan dalam mengawaki alutsista tersebut. Adapun faktor eksternal adalah Indonesia saat ini menghadapi perkembangan geopolitik global yang sangat bersifat dinamis, untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan negara sangat diperlukan sistem alutsista yang kuat dalam menghadapi ancaman global. Maka perawatan dan pemeliharaan untuk modernisasi alutsista sangat diperlukan dalam meningkatkan daya gantar Indonesia di percaturan politik global.

Anggaran minimum untuk negara besar seperti Indonesia harus diperhitungkan, jikalau anggaran tersebut menjadi masalah dalam pengadaan alutsista maupun masalah dalam pemeliharaan dan perawatan, maka solusinya adalah pembuatan *masterplan* baru untuk membuat suatu planning terhadap pengadaan ataupun pemeliharaan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga *masterplan* menjadi rencana induk sebagai solusi dalam menghadapi minimumnya anggaran, meskipun upaya modernisasi alutsista telah dipetakan secara efektif sejak tahun 2007 melalui sistem *Minimum Essential Force* (MEF), tampaknya kemajuan berjalan melambat.

Sehingga dalam menghadapi ancaman yang nyata, sudah saatnya Indonesia memiliki

pertahanan dan keamanan yang kuat. Dari tragedi KRI Nanggala-402 juga seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih fokus pada modernisasi alutsista dengan cara membuat suatu *masterplan* baru sebagai pengganti MEF, tentunya *masterplan* terhadap alutsista yang dimiliki oleh pemerintah bukan hanya saja bermanfaat bagi keselamatan pengawaknya tapi juga bermanfaat dalam menghadapi tantang geopolitik global yang sewaktu-waktu dapat mengancam pertahanan dan keselamatan bangsa.

Pada akhirnya saat ini Menteri Pertahanan sedang mempersiapkan *masterplan*, hal ini merupakan buntut panjang implementasi dari perintah Presiden yang menginginkan rencana pengadaan alutsista dalam waktu 25 tahun. Meski masih berupa draf dan belum jelas apakah *masterplan* akan sekaligus menggantikan MEF sebagai acuan biaya, namun hal itu cukup memberi angin segar dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran pengadaan alutsista. Dalam pembuatan *masterplan* tersebut juga harus memasukkan rencana induk yang mencakup beberapa serangkaian tindakan untuk memastikan akuntabilitasnya, rangkaian tindakan tersebut antara lain:

1. Pemerintah harus terlebih dahulu memperkuat peran dan juga kegiatan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
2. Pemerintah juga harus memperkuat aturan dalam memastikan kapasitas dan akuntabilitas.
3. Penyusunan indikator kemandirian industri pertahanan nasional harus disusun berdasarkan proporsi kebutuhan.
4. Pemerintah harus memprioritaskan perencanaan anggaran dengan matang, berkesinambungan dan terukur
5. Pemerintah juga harus memberikan dukungan anggaran relatif untuk mempromosikan kegiatan penelitian dan juga pengembangan di perguruan tinggi dalam mendorong inovasi di industri pertahanan dalam negeri.

Sehingga dalam pembuatan *masterplan* yang disiapkan oleh Menhan RI ke dalam rencana jangka panjang pertahanan negara 25 tahun ke depan, pembentukannya berdasarkan pada beberapa aspek, seperti penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan strategis, geopolitik dan geostrategi serta mempertimbangkan prakiraan ancaman militer dan non-militer, selain itu pemerintah juga harus

menyiapkan kemampuan pertahanan siap tempur dan pengembangannya.

Sejauh ini tingkat keberhasilan MEF adalah 65 persen dari target 75 persen. Lambatnya implementasi MEF tidak terlepas dari terbatasnya anggaran lembaga pertahanan, yang artinya kedepan akan diperlukan perencanaan yang benar-benar komprehensif berdasarkan skala prioritas yang jelas, terukur dan berkelanjutan serta terkait dengan prediksi bentuk dan ukuran ancaman terhadap pertahanan negara, meskipun *masterplan* yang akan dibentuk mungkin belum sepenuhnya jelas, hal itu setidaknya bisa memberikan angin segar bagi keterbatasan anggaran di Indonesia dalam menghadapi dunia global.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang rencana induk modernisasi alutsista selama 25 tahun mendatang, jika draft *masterplan* dapat disetujui oleh presiden maka Indonesia dapat memenuhi target belanja pertahanan. Terkait dengan pengadaan alutsista, *masterplan* sangat diprioritaskan untuk dibentuk secepatnya hal ini dikarenakan alutsista merupakan suatu alat dalam bidang pertahanan yang berfungsi sebagai alat menjaga keamanan dan kedaulatan negara, bila alutsista kita lemah maka lemah juga sistem pertahanan negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Anggaran minimum yang diberikan oleh negara kepada lembaga pertahanan Indonesia sangat mempengaruhi terhadap sistem pertahanan nasional. Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis sehingga pembahasan anggaran juga harus diperhitungkan karena jikalau anggaran tersebut menjadi masalah maka hal ini akan memberikan efek rentan terhadap pertahanan nasional, terlebih sistem pertahanan Indonesia juga sangat bergantung pada alutsista yang dimiliki. Jikalau MEF yang telah dipetakan dari tahun 2007 tidak membuahkan hasil karena ada keterlambatan dalam mencapainya akibat dari buntutnya anggaran maka solusinya adalah pembuatan *masterplan* baru untuk membuat planning terhadap pengadaan ataupun pemeliharaan alutsista yang dimiliki Indonesia, nantinya *masterplan* tersebut akan dijadikan sebagai rencana induk solusi dalam menghadapi minimumnya anggaran. Hal ini tentunya akan

memberikan dampak yang signifikan terkait dengan menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisa Pembentukan *Masterplan* Alutsista di Indonesia Guna Memperkuat Sistem Pertahanan Nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Khairul Fahm, Pengamat *Militer Di Institute For Security And Strategic Studies* (ISESS).
- Marina Ika Sari Peneliti di *ASEAN Studies Program The Habibie Center*
- Hamirduin dkk, 2022. "Transformasi Sistem Maintenance, Repair And Overhaul TNI AD Guna Mendukung Kesiapan Alutsista (Studi Kasus : Bengkel Pusat Peralatan Angkatan Darat)" *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. E.Issn.2614-6061 P.Issn.2527-4295 Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022
- Marusic, Zeljko. Izidor Alfirevic, Omer Pita. (2009). "Maintenance Reliability Program As Essential Prerequisite Of Flight Safety". *Jurnal Promet-Traffic & Transportation*, Vol. 21, 2009, No. 4, 269-277 Prihananto, Didik (2006). *Diklat Teknik Perawatan Pesawat Terbang*, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, Yogyakarta.
- Sumari, Arwin D.W. (2008). "Konsep Pemeliharaan Jarak Jauh Alat Utama Sistem Senjata Udara". *Buletin Koharmatau*, hal.25. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/diakses pada 10 Desember 2019](https://www.researchgate.net/publication/diakses%20pada%2010%20Desember%202019).
- Undaing-Undaing No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- www.dpr.go.id
- www.habibiecenter.or.id